



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINIE OLYVIA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN RENCANA KERJA, KEUANGAN DAN ASET
3. NHK : 636822

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.520.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m²/45 m² di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/144 m² di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 9200 m² di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 5840 m² di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 198 m² di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m²/80 m² di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
7. Tanah Seluas 2192 m² di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 10000 m² di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 7500 m²/50 m² di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 79.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU AYLA AYLA X ELEGANT M/T/MI Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



2. MOTOR, YAMAHA RXKING SOLO Tahun 2003, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000

3. MOTOR, YAMAHA MIO SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.221.931

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.681.221.931

III. HUTANG Rp. 690.759.967

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.990.461.964

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.